

**LOCAL RESOURCE DEVELOPMENT AT LIMA PULUH KOTA  
REGENCY OF WEST SUMATRA (CASE STUDY: GAMBIR  
MANAGEMENT AT PANGKALAN KOTO BARU SUB-DISTRICT)**

**Rozi Saputra**

**Email: rozisaputra192@gmail.com**

**Supervisor: Dr. H. Zaili Rusli, SD. M.Si**

Program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik-  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Panam,  
Pekanbaru-Riau

***ABSTRACT***

The Management of gambir as a featured commodity of Lima Puluh Kota Regency and Pangkalan Koto Baru Sub-district is very important. It's because of gambir commodity is a featured commodity and contributes greatly to the Regional Domestic Product of Lima Puluh Kota particularly and West Sumatra in general. Based on field observation, there are some problems regarding lack of utilization of gambir land compared, lack of proper use of technology in gambir processing, low quality of gambir products and makes gambier derivative products don't have much variation also impact to price fluctuations. The purpose of this research are to know how the management of Gambir at Pangkalan Koto Baru is and any factors may affect the processing of gambir in this sub-district.

The concept of theory used is the management theory by George R.Terry which starts with planning, organizing, actuating and controlling. This research uses qualitative descriptive research method. The type of data used is primary data and secondary data. In the data collecting, researchers use observation techniques, interviews, literature study and documentation. Interviews were conducted with key informants.

The result of this research is that the management of Gambir in Pangkalan Koto Baru Sub-district of Lima Puluh Kota has not been maximized. There are still major shortcomings in planning, organizing and controlling. Then the factors that become obstacles in Gambir management at Pangkalan Koto Baru Sub-district are institutional, budget, facilities and infrastructure and market.

**Keywords: Management, Local Resources Development, Gambir**

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT (STUDI KASUS:  
PENGELOLAAN GAMBIR DI KECAMATAN PANGKALAN KOTO  
BARU)**

**Oleh :Rozi Saputra**

**Email:rozisaputra192@gmail.com**

**Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli, SD, M.Si**

Program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik-  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Panam,  
Pekanbaru-Riau

***ABSTRACT***

Pengelolaan Gambir sebagai komoditi unggulan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru sangat penting, mengingat komoditi gambir merupakan komoditi unggulan dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDR (Produk Domestik Regional) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan observasi dilapangan, ada beberapa permasalahan mengenai gambir yaitu minimnya pemanfaatan lahan gambir, minimnya penggunaan teknologi tepat, kualitas produk gambir rendah dan tidak bervariasinya produk turunan gambir yang dihasilkan serta fluktuasi harga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Gambir pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengelolaan Gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.

Konsep teori yang digunakan adalah teori manajemen oleh Goerge R.Terry yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan kunci.

Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengelolaan Gambir pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota belum maksimal. Masih terdapat kekurangan terutama pada perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Kemudian faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan Gambir pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu kelembagaan, anggaran dan sarana dan prasaran serta pasar.

***Kata Kunci: Pengelolaan, Pengembangan Sumber Daya Lokal, Gambir***

## **A. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana setiap daerahnya mempunyai sumber daya alam yang beranekaragam. Sebagai negara agraris, sektor pertanian memiliki peran yang penting dalam pembangunan negara dan daerah. Pengembangan pertanian masih menjadi fokus pemerintah saat ini. Pada dasarnya, tujuan pengembangan pertanian tidak hanya sebagai usaha untuk meningkatkan produksi pertanian tetapi yang paling penting adalah meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa setiap daerah berhak untuk mengurus kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah harus mampu melihat sektor yang memiliki peluang untuk meningkatkan pembangunan daerah. Selanjutnya pada BAB IV Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yaitu meliputi: Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Transimigrasi.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya unggulan dibidang pertanian yaitu komoditi gambir. Komoditi gambir termasuk kedalam sub sektor perkebunan.

Gambir menjadi komoditi ekspor unggulan Indonesia karena memasok kebutuhan dunia hingga mencapai 80%, sementara 80% produk gambir Indonesia diproduksi oleh para petani Sumatera Barat. Sisa produksi gambir lainnya disumbangkan oleh Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.

Gambir merupakan hasil ekstraksi rebusan daun dan ranting tanaman gambir yang dikeringkan. Secara modern kegunaan gambir adalah sebagai bahan baku dalam industri tekstil dan batik. Dalam industri komestik, gambir digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan astrigen dan lotion. Untuk industri farmasi dan makanan, gambir digunakan sebagai bahan baku obat sakit perut dan sakit gigi. Untuk industri makanan digunakan sebagai bahan baku permen yang melegakan kerongkongan bagi perokok. Sedangkan secara tradisional, gambir digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional dan pelengkap makan sirih baik untuk kegiatan sehari-hari maupun dalam acara adat.

Sebagian besar produksi gambir di Provinsi Sumatera Barat berada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebuah Kabupaten yang menjadikan pertanian sebagai basis ekonominya. Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani baik itu petani tanaman pangan, petani hortikulturan maupun sebagai petani perkebunan. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Provinsi Riau dan dilalui oleh gugusan bukit barisan serta beriklim tropis sehingga tanahnya cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian

salah satunya yaitu komoditi gambir. Gambir merupakan komoditi perkebunan terluas di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Selain itu, Kecamatan Pangkalan Koto Baru juga sebagai daerah sentra gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sehingga dapat dikatakan bahwa gambir merupakan komoditi unggulan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa sub sektor perkebunan gambir merupakan komoditi unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota. Walaupun menjadi salah satu daerah sentra gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota, namun komoditi Gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Jika dilihat dari luas produksi gambir, maka terdapat tiga daerah yang menjadi sentra gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketiga daerah itu adalah Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Bukit Barisan. Namun hanya kecamatan Pangkalan Koto Baru yang belum memiliki sarana dan prasarana teknologi tepat guna dalam pengolahan gambir sehingga berdampak terhadap pemanfaatan dan produk gambir yang dihasilkan.

Selama ini proses pengolahan atau biasa dikenal dengan istilah *mangampo* gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru masih tradisional. Dimulai dari pemetikan daun tanaman gambir, lalu daun tersebut dimasukan kedalam *kapuk* (keranjang dari rotan atau kulit kayu yang digunakan sebagai kemas daun gambir yang sedang direbus). Setelah itu, gambir yang sudah

direbus akan diperas untuk diambil sari patinya dengan menggunakan alat sederhana seperti dongkarak. Kemudian, hasil perasan didiamkan agar mengendap. Hasil endapan tersebut dicetak menggunakan *cupak* (potongan bambu yang digunakan untuk mencetak gambir). Setelah dilakukan pencetakan kemudian gambir dikeringkan dengan memanfaatkan sinar matahari.

Pada umumnya, gambir dijual keluar walaupun dimanfaatkan masyarakat hanya sekitar 1 sampai 2 % untuk campuran makan sirih. Gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang dijual keluar hanyalah berbentuk gambir setengah jadi yang telah diolah oleh petani. Rantai penjualan gambir adalah dimulai dari petani gambir memproduksi gambir yang selanjutnya gambir tersebut dibeli oleh toke, lalu toke menjual kepada pedagang besar, pedagang besar Sumatera Barat membawa gambir mentah tersebut ke Medan, Sumatera Utara dan menyerahkan kepada eksportir. Disanalah terjadi transaksi perdagangan dari pedagang besar menjual gambir tersebut kepada eksportir.

Disebabkan karena keterbatasan teknologi pengolahan gambir di Indonesia, eksportir disini tidak langsung mengeksport gambir setengah jadi tersebut ke India, namun gambir tersebut terlebih dahulu dieskpor ke Singapura (importir transito) untuk diolah menjadi ekstrak gambir yang bagus dan dipisahkan sesuai dengan kualitasnya. Setelah itu barulah eksportir Singapura yang mengeksport gambir yang telah diolah menjadi ekstrak gambir tersebut ke India. Panjangnya rantai pemasaran gambir

ini berdampak terhadap harga jual gambir. Selain itu, fluktuasi harga gambir juga disebabkan rendahnya mutu produk gambir yang dihasilkan. Biasanya pencampuran bahan-bahan tersebut ditujukan untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi.

Berdasarkan pada latar belakang dan fenomena-fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengembangan Sumber Daya Lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Pengelolaan Gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat suatu perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan penelitian:**

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Pengelolaan Gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian:**

1. Secara Akademis, peneliti dapat menanbah wawasan

bagi para akademis, khususnya dibidang administrasi pembangunan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru pada penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih yang nyata bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan **Sugiono (2006:11)**.

### **1.4.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, sehingga sebuah penelitian akan mendapatkan hasil. Sesuai dengan judul dan perumusan permasalahan, maka penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

### **1.4.3 Informan Penelitian**

Informan yang digunakan sebagai objek informasi bagi peneliti untuk mengetahui tentang pengelolaan gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota

2. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
4. Penyuluh Pertanian Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5. Petani Gambir Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

### 1.5.1 Sumber Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi Kepustakaan
4. Dokumentasi

### 1.6 Analisis Data

Dalam menganalisis data yang peneliti peroleh dari data primer dan data sekunder, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengklasifikasi, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil berdasarkan hasil penelitian.

Pengkajian secara deskriptif yaitu penjabaran yang dilakukan dengan menggambarkan atau menjelaskan masalah yang ada atau berusaha menggambarkan secara terperinci berdasarkan kenyataan serta memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk mendapatkan data mengenai pengelolaan gambir pada Kecamatan

Pangkalan Koto Baru. Setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian data dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya, serta ditambah keterangan yang sifatnya mendukung dan menjelaskan hasil dari penelitian.

## 2.HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengelolaan Gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah bagian kelima pasal 21-24 bahwanya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan instansi pemerintah yang berperan dalam melakukan pengelolaan bidang pertanian salah satunya bagi komoditi gambir.

Untuk menjadikan pengelolaan komoditi gambir yang berkelanjutan maka pihak terkait berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan usaha mencari dan melaksanakan kegiatan mulai dari menyusun program atau perencanaan dan merealisasikan kelengkapan sehingga terwujud pengelolaan gambir yang berkelanjutan, dimana berkelanjutan disini dengan pertimbangan 3 (tiga) aspek yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek sosial.

Pengelolaannya itu sesuai dengan di RPJPD bahwa gambir merupakan komoditi utama, andalan dan unggulan. Untuk Sumatera Barat , gambir Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan kontribusi yang besar kepada PDR sumbar. Pengelolaannya

sudah dimulai dari hulu sampai ke hilir.

Jika dilihat dari peraturan daerah yang mengatur, maka peraturan daerah yang mengatur tentang komoditi gambir belum ada dirumuskan khususnya untuk komoditi gambir. Peraturan daerah yang mengatur barang kali belum ada yang khusus membahas tentang komoditi gambir, hanya saja ada kebijakan untuk pertanian ini ada berupa SK Bupati tentang kawasan. Jadi diharapkan kawasan ini dapat menghasilkan gambir secara berkelanjutan dan ini merupakan komoditi unggulan bagi daerah yang telah kita tetapkan salah satu daerahnya yaitu Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan gambir tersebut penulis meneliti dengan menggunakan teori George R. Terry yang menjadi yang menjadi indikator-indikator sebagai berikut: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*).

Selanjutnya penulis akan menjelaskan masing-masing indikator tersebut menurut jawaban hasil wawancara terhadap informan yang telah dilakukan. Untuk mengetahui tanggapan informan tersebut terhadap indikator-indikator di atas penulis akan menguraikan indikator-indikator tersebut dengan lebih jelas seperti yang tercantum berikut:

### **1. Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan yang dimaksudkan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dalam keputusan tentang apa selanjutnya yang akan dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Suatu perencanaan disusun untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau setidaknya mampu mendekati batasan keinginan yang akan dirumuskan dalam rencana. Perencanaan dibutuhkan untuk menetapkan tujuan organisasi secara keseluruhan. Pembentukan tujuan adalah suatu kegiatan untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan telah membuat tujuan dari pengelolaan Gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Tujuan kita, kita berusaha untuk meningkatkan produktivitas yang jelas produksi, produksi itu bisa berupa perluasan area atau meningkatkan produkivitas per ha nya. Kemudian disamping itu, kita juga berusaha untuk menciptakan diversifikasi (bentuk produk) dari pada gambir itu sendiri. Kalau kemaren itu gambir hanya dalam bentuk getahnya saja sekarang ini kita sudah masuk dalam pengolahan daun sehingga ada nilai tambah lain yang bisa dimanfaatkan oleh petani.

Selain dari penetapan tujuan, tahapan perencanaan juga berfungsi untuk menetapkan sasaran dari perencanaan yang dibuat. Sasaran adalah pihak-pihak yang akan dituju oleh para perumus perencanaan. Sasaran pengelolaan gambir ini adalah peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan khususnya untuk petani gambir perorangan, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani mulailah hal tersebut dari pengolahannya nantinya kita coba bina karena ini adalah ujung dari pada produksi supaya ada jaminan nanti untuk harganya sendiri.

## **2. Pengorganisasian (Organizing)**

Setelah melakukan perencanaan sebagai fungsi manajemen yang pertama tentunya harus melakukan fungsi manajemen yang lainnya. Salah satu fungsi lain manajemen adalah mengetahui pengorganisasian yang merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting karena dengan pengorganisasian berarti akan memadukan seluruh sumber-sumber yang ada dalam organisasi, baik yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya ke arah tercapainya suatu tujuan.

Pengorganisasian adalah fungsi untuk mengelompokkan dan melakukan pembagian tugas. Untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota di setiap kecamatan, maka dibentuklah Unit Pelaksana Tugas (UPT).

Disini kami selaku UPT adalah perpanjangan tangan dari dinas, jadi kami bertanggung jawab terhadap apa saja permasalahan di dinas maka perpanjangan tangannya adalah upt. Kami disini istilahnya disini, kalau di kecamatan pangkalan ada upt dan penyuluh. Kalau ada permasalahan gambir maka ujung tombaknya adalah upt dan penyuluh. Kami disini selaku upt kalau ada program-program dari dinas maka upt lah yang memberi tahu kepada penyuluh dan nantinya penyuluh menyampaikan ke kelompok dan petani.

## **3. Pelaksanaan (Actuating)**

Pelaksanaan atau *actuating* adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai tujuan dan

saaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan usaha-usaha organisasi. Pelaksanaan artinya mengerakan orang-orang agar bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang di kehedaki secara efisien.

Fungsi pelaksanaan lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang berada didalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti oleh pelaksanaan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia pada pelaksanaan tugasnya. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengelolaan gambir pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh.

Pelaksanaan dari tujuan yang telah kita tetapkan saat ini belum banyak yang masih banyak kita lakukan, sepanjang tahun ini masih tahap bimtek dan bantuan bibit namun semuanya masih tahap perencanaan dan belum dilaksanakan. Kalau untuk tahun kemaren itu kita membuat buku ig gambir gambir dan ini akan diajukan ke MENKUHAM untuk nanti diuji kebenarannya, itu untuk tahapan kemaren.

## **4. Pengawasan (Controlling)**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen selalu menempatkan kegiatan pengawasan sebagai salah satu kegiatan yang sangat penting dalam manajemen. Kasus-kasus yang banyak terjadi di dalam organisasi adalah tidak

terselesaikannya suatu pengawasan, tidak tepatnya waktu dalam tahapan penganggaran yang berlebih dan kegiatan-kegiatan lain yang banyak menyimpang dari perencanaan yang telah ditentukan.

Jika untuk yang pengawasan kita juga belum punya semacam wadah yang memang kita mengawasi bagi kalau ada yang gambirnya dicampur tapi masih sebatas tahap penyuluhan, kita sampaikan pada saat penyuluhan kalau memang gambir kita mau dinilai orang dengan harga yang tinggi cobalah kita memakai seperti ini jangan dicampur dengan bahan lain. Tapi semacam wadah atau ada sanksi-sanksi nya itu belum.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.**

### **1. Kelembagaan.**

Kelembagaan berbasis sumber daya lokal merupakan proses dimana pemerintah daerah dan/atau kelompok berbasis masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan masuk kepada penataan kemitraan baru dengan sektor swasta atau diantara mereka sendiri untuk menciptakan pekerjaan baru dan merangsang kegiatan ekonomi wilayah. Orientasi ini mengarahkan kepada fokus dalam proses pengembangan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan lembaga.

Pengelolaan gambir pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru selama ini masih dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan melalui UPT Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Pangkalan

Koto Baru. Tidak adanya lembaga khusus yang menangani tentang gambir sehingga komoditi gambir sebagai komoditi unggulan dari Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terkelola dengan baik. Padahal jika dilihat dari potensinya, komoditi gambir mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan pembangunan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kabupaten Lima Puluh Kota terutamatn dalam pembangunan ekonomi.

### **2. Anggaran.**

Dalam kegiatan manajemen atau pengelolaan terdapat unsur 6 M (*Man, Money, Method, Material, Machine & Market*). Salah satu unsur tersebut adalah anggaran (*money*). Anggaran sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan manajemen yang dilakukan.

Dalam pengelolaan gambir pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terlebih dahulu harus membuat standarisasi mutu dan harga gambir sehingga produk yang dihasilkan mempunyai mutu yang murni. Selain itu dengan adanya standarisasi harga, para petani tidak akan dirugikan mengingat posisi tawar petani yang rendah.

Tidak hanya pembuatan standarisasi, didalam pengelolaan gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru juga harus merencanakan pengadaan teknologi tepat guna yang harus bagus dibandingkan teknologi yang pernah dicoba, semuanya itu membutuhkan anggaran. Minimnya anggaran inilah yang membuat permasalahan gambir pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru terus terjadi.

### 3. Sarana dan Prasarana.

Selain dari pada anggaran (*money*), unsur sarana dan prasarana (*machine*) juga turut menentukan keberhasilan dari kegiatan manajemen atau pengelolaan yang dilakukan. Pada pengelolaan gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru masih menggunakan sarana dan prasarana pengolah gambir yang tradisional sehingga membuat produk turunan yang dihasilkan masih berbentuk gambir mentah.

### 4. Pasar.

Selain anggaran (*money*) dan sarana dan prasarana (*machine*) hal yang membuat belum maksimalnya pengelolaan gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah belum adanya pasar (*market*) yang representatif untuk menjual hasil produksi gambir. Selama ini para petani gambir menjual hasil panennya kepada toke yang berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru kemudian toke tersebut menjualnya kembali kepada pedagang besar dan pedagang besar menjualnya kepada eksportir.

Panjangnya rantai pemasaran ini membuat posisi tawar petani gambir menjadi lemah sehingga harga gambir ditentukan oleh para pedagang. Selain itu, besarnya biaya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari petani gambir membuat mereka terpaksa berhutang kepada toke dengan jaminan bahwa hasil panen gambir petani dijual kepada toke tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan.

1. Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap komoditi gambir masih

belum sesuai harapan. Pengelolaan yang dilakukan masih hanya sebatas pada tahap sosialisasi dan penyuluhan. Belum adanya perencanaan tentang regulasi yang mengatur mengenai komoditi gambir sebagai komoditi unggulan dari Kabupaten Lima Puluh Kota membuat komoditi gambir kurang difokuskan pengelolaannya jika dibandingkan dengan komoditi tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Selain itu, fluktuasi harga membuat para petani tidak merawat ladang gambirnya, walaupun sekarang ini harga gambir naik tidak menutup kemungkinan harga tersebut akan kembali turun karena produk gambir yang dihasilkan petani memiliki mutu yang rendah dan produk turunan tidak bervariasi. Rendahnya mutu gambir tersebut disebabkan oleh adanya perilaku petani yang mencampurkan bahan lain seperti tanah, tepung dan pupuk kedalam olahan gambir. Disisi lain, pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Unit Pelaksana (UPT) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak dapat sepenuhnya mengawasi para petani yang melakukan tindakan tersebut karena keterbatasan pegawai yang memiliki kapabilitas dibidang budidaya perkebunan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan gambir pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum maksimal.

2. Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap komoditi gambir masih belum sesuai harapan. Pengelolaan yang dilakukan masih hanya sebatas pada tahap sosialisasi dan penyuluhan. Belum adanya perencanaan tentang regulasi yang mengatur mengenai komoditi gambir sebagai komoditi unggulan dari Kabupaten Lima Puluh Kota membuat komditi gambir kurang difokuskan pengelolaannya jika dibandingkan dengan komoditi tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Selain itu, fluktuasi harga membuat para petani tidak merawat ladang gambirnya, walaupun sekarang ini harga gambir naik tidak menutup kemungkinan harga tersebut akan kembali turun karena produk gambir yang dihasilkan petani memiliki mutu yang rendah dan produk turunan tidak bervariasi. Rendahnya mutu gambir tersebut disebabkan oleh adanya perilaku petani yang mencampurkan bahan lain seperti tanah, tepung dan pupuk kedalam olahan gambir. Disisi lain, pihak Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Unit Pelaksana (UPT) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak dapat sepenuhnya mengawasi para petani yang melakukan tindakan tersebut karena keterbatasan pegawai yang memiliki kapabilitas dibidang budidaya perkebunan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan gambir pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum maksimal.

#### **Saran.**

1. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus membentuk badan daerah yang khusus menangani tentang komoditi gambir sebagai komoditi unggulan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota beserta instansi pemerintah lain yang juga menangani komoditi gambir harus meningkatkan koordinasi guna membuat kebijakan khusus komoditi gambir dan membuat perencanaan produk turunan komoditi gambir yang lebih bernilai ekonomi.
3. Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan harus meningkatkan kerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Sumatera Barat untuk memperbaiki teknologi pengolahan gambir yang sudah ada agar dapat menghasilkan produk gambir yang memiliki kualitas bagus. Selama ini teknologi tepat guna yang pernah dipakai oleh para petani gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dari hasil bantuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dirasa kurang memuaskan terhadap produk gambir yang dihasilkan. Oleh sebab itu diharapkan dengan peningkatan kerjasama ini membuat teknologi pengolahan dapat diperbarui sehingga menghasilkan produk gambir yang berkualitas.

4. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota harus meningkatkan koordinasi dengan Dinas UKM Koperasi Perdagangan dan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota untuk membuat pasar gambir yang lebih representatif serta memberikan kemudahan akses informasi mengenai pasar dan harga gambir bagi para petani gambir.
5. Mengoptimalkan fungsi sistem resi gudang untuk meminimalisir kerugian petani terhadap harga gambir yang fluktuasi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Dengan adanya sistem resi gudang akan membuat petani gambir Kecamatan Pangkalan Koto Baru dapat menunda untuk menjual hasil panen gambirnya dengan cara menyimpannya di gudang yang telah memenuhi persyaratan sebagai resi gudang serta dapat menjual gambir yang disimpan tersebut kapan pun sesuai dengan keinginan petani yang bersangkutan, misalnya pada saat harga gambir turun petani dapat menyimpannya pada resi gudang dan menjualnya jika harga naik.
6. Membentuk kelembagaan seperti kelompok tani khusus komoditi gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Dengan adanya kelompok tani gambir maka akan menjadi wadah mendapatkan informasi bagi anggota kelompok guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
7. Peningkatan peran Asosiasi Petani Gambir (APEGI) Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai wadah para petani gambir untuk mendapatkan informasi seputar teknik budidaya komoditi gambir yang baik dan informasi tentang pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristo. 2004. *Rejuvinasi Peran Perencanaan Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif "Sebuah Tahapan Awal Dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif"*. Malang: Brawijaya Press
- Badrudin. 2014. *Dasa-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Brantas. 2009. *Mengenal Manajemen Oerorganisasi*. Jakarta: Yudistira
- Daft Richard.L. 2008. *Era Mananjemen*. Jakarta: Slaemba Empat
- Dahudrin, dkk. 2004. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradya Pramita
- Darwis, dkk. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pusat Pengembangan Pelatihan Pekanbaru: Universitas Riau
- Dewi, Ira. Cristyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Pretasi Pustaka
- Dilla. Sumandi. 2007. *Komunikasi Pembangunan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Enati. Wahyudi. 2012. *Budidaya dan Pengolahan Gambir dan Tembakau*. Tanjung Pati: Politeknik Pertanian Payakumbuh

- Handoko, Hani. 2001. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 2008. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:BPFE
- Hasibuan, H.Malayu.S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Ketujuh*. Jakarta: Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BumiAksara
- Karyoto. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Andi
- Manullang.M. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Mubyarto. 2004. *Strategi Pembangunan Berkeadilan*. Yogyakarta: Yayasan Mulia Bangsa
- Safi'i.H.M. 2009. *Mnajemen Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)*. Malang:Averroes Press
- Siagian.P.Sondang.2001.*Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu, Kencana. 2006. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Adminisrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Terry, George. R. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Tikson, Deddy. T. 2005. *Pembangunan Masyarakat Idonesia*. Yogyakarta: Lyberti
- Winardi.J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- \_\_\_\_\_. 2006. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- Yahya Yohanes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu